

Catatan Pertemuan
Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI VI
Jakarta, 11 Maret 2011

I. Pesan-Pesan Utama Saat Pembukaan:

1. Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI

- Sebagai satu-satunya lembaga yang memfokuskan diri pada pengelolaan pengetahuan pembangunan di KTI, Yayasan BaKTI melihat pentingnya peran ini untuk dikembangkan secara lebih mandiri, profesional dan berkelanjutan. BaKTI akan berkiprah secara lebih efektif dalam menjawab tantangan kesenjangan akses informasi dan pertukaran pengetahuan yang diyakini sebagai salah satu tantangan pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Langkah ke sana dilakukan dengan memperluas jaringan kerja BaKTI, mempererat kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah serta media untuk penyebarluasan cerita-cerita keberhasilan pembangunan di KTI, serta secara aktif melakukan identifikasi praktik-praktik cerdas baru dari KTI dan mendorong replikasi/adopsi. Secara khusus diharapkan juga bahwa Forum Kepala Bappeda dapat mengidentifikasi praktik-praktik cerdas di bidang pemerintahan yang ada di KTI.

2. Ketua Kelompok Kerja Forum KTI/Koordinator Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI

- Forum Kepala Bappeda dilaksanakan dua kali setahun dan terdiri atas Kepala Bappeda Provinsi dari dua belas provinsi di KTI. Fokus Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI adalah pada usaha peningkatan koordinasi pembangunan antar-pemerintah daerah juga antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta untuk berbagi praktik cerdas dalam bidang perencanaan pembangunan.
- Diharapkan ada masukan konkrit pada Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI VI dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional dan rumusan isu-isu strategis di masing-masing provinsi sebagai masukan bagi penyusunan RKP 2012.
- Isu strategis yang telah disampaikan sebelumnya pada rapat Bappenas tgl 10 Maret 2011, akan lebih fokus untuk mendukung program nasional. Antara lain Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur akan lebih fokus pada pengembangan peternakan yakni sapi dalam rangka mendukung program nasional Swasembada Daging 2014, Sulbar fokus pada pengembangan nasional Kakao 2014, Maluku mengembangkan Wilayah Industri Perikanan dan Kelautan. Untuk itu, telah disepakati bersama untuk melakukan kerjasama untuk program prioritas yang bisa “dikeroyok” melalui intervensi beberapa program. Misalnya pengembangan Teluk Tomini yang melintasi tiga provinsi yakni Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara, pengembangan laut Arafura yang melintasi 3 provinsi yaitu Maluku, Papua dan Papua Barat yang akan dikembangkan sebagai industri perikanan dan kelautan. Sulawesi juga sepakat untuk mengembangkan pulau Sulawesi sebagai Basis Ketahanan Pangan Nasional.

- Butuh dukungan dari Menteri Bappenas agar peran Bappeda dapat diperkuat. Melihat tugas dan tanggung jawab Bappeda yang sangat tinggi dibandingkan dengan SKPD lainnya, diharapkan usulan agar Eselon Kepala Bappeda dapat menjadi Eselon 1B dan Kabid menjadi Eselon IIB dapat direalisasikan.
- Terimakasih atas kehadiran Ibu Menteri pada pertemuan Forum Kepala Bappeda se KTI sebagai salah satu bukti komitmen beliau untuk percepatan pembangunan di KTI. Kawasan Timur Indonesia siap mendukung program Nasional.

3. Arahan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

- Ada 3 hal yang ingin disampaikan, melanjutkan pertemuan di Bappenas tgl 10 Maret 2011:
 - a) Terkait substansi atau fokus prioritas pembangunan khususnya di KTI
 - Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Percepatan dan Perluasan Koridor Ekonomi Indonesia) yang masih bergulir. Hendaknya melihat Indonesia sebagai satu kesatuan, bahwa itu dibagi ke dalam koridor-koridor adalah strategi untuk fokus sesuai dengan potensi unggulan masing-masing daerah. Diperlukan forum-forum koordinasi seperti Forum Kepala Bappeda ini untuk mensinergikan program pembangunan.
 - Bappeda diminta memberi perhatian yang cukup pada 2 aspek yang merupakan bagian master plan: *domestic connectivity* (kunci percepatan pembangunan KTI) dan *soft Infrastructure* (terkait regulasi) bagaimana akses transportasi bisa saling terhubungkan sehingga masalah biaya yang mahal bisa teratasi.
 - b) Mekanisme kerjasama dalam perencanaan pembangunan
Dalam pembangunan tidak hanya substansi tapi perlu ada *sense of partnership* dan *sense of ownership* dari semua stakeholder. Sedang dicari format untuk pra musrenbang & musrenbang dari seluruh stakeholder (participation). Penelitian harus ditingkatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan.
 - c) Sinergitas dengan Development Partner
Dalam konteks *development cooperation*, harus melibatkan semua stakeholder. Tujuannya untuk penguatan segala aspek. *Development Cooperation* bertujuan juga untuk memperkuat *potioning* Indonesia pada forum internasional sekaligus Indonesia bisa share ke negara-negara lain tentang *best practice, lesson learned*. Bappeda diharapkan dapat berfungsi sebagai koordinator dan memfasilitasi berbagai aktivitas development partner di daerah.

II. Presentasi Direktur Pengembangan Wilayah Bappenas

- Presentasi mengenai Penyusunan Isu Strategis Percepatan Pembangunan KTI sudah dilaksanakan pada pertemuan Bappenas sehari sebelumnya tgl 10 Maret 2011, sehingga presentasi Bappenas fokus mengenai Koridor Ekonomi Indonesia sesuai arahan Ibu Menteri sebelumnya. Pada sesi diskusi, diharapkan masukan dari masing-masing Bappeda untuk isu-isu strategis.
- Konsep besar dari Koridor Ekonomi Indonesia adalah Grand Design Transformasi Ekonomi Indonesia. Tujuannya adalah bagaimana mengoperasionalkan dengan lebih rinci lagi amanat

buku III RPJMN. Amanatnya adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah yang terdiri dari kesenjangan dibidang sosial dan pertumbuhan ekonomi.

- Posisi Indonesia semakin meningkat, Indonesia sebagai 1 dari 10 negara yang memiliki daya tarik terbesar yang mengalahkan negara ASEAN lainnya. Modal yang bagus bagi Indonesia adalah usia produktif lebih banyak daripada usia tua. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang besar, masalahnya hampir semua diekspor dalam keadaan mentah. Diharapkan ada nilai tambah dari hasil alam ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi dengan melakukan terobosan-terobosan.
- Yang mendasari transformasi ekonomi adalah industrialisasi, ada dua sisi: Sisi Permintaan dan Sisi Suplai. Dari Sisi Permintaan : (i) Investasi di sektor industri dan infrastruktur serta (ii) perdagangan internasional. Sisi permintaan melibatkan 3 pihak: swasta dan investasi publik di infrastruktur; pemerintah pusat dan daerah menjadi koordinator, katalisator dan fasilitator; investasi pada industri pengolahan terutama dilakukan oleh swasta. Dari Sisi Suplai masih diperlukan konsentrasi pusat pertumbuhan agar lebih efisien. RPJMN dan RPJP menjadi acuan utama di tingkat nasional dan daerah. Dari sisi ini harus dicapai pertumbuhan *total factor productivity* (mencapai output lebih banyak per unit input) yang tinggi, melalui peningkatan *economic of scale* terutama diperoleh akibat adanya konsentrasi lokasi industri (Osaka di Jepang, Guang Zhou di China, Mumbai di India); meningkatnya kapasitas sosial untuk menguasai dan mengembangkan teknologi; pergeseran kegiatan dari sektor produktivitas rendah kepada sektor produktivitas tinggi.
- Grand Design Transformasi Ekonomi juga sudah mengakomodir rencana aksi nasional. Yang menjadi perhatian oleh pemerintah pusat dan daerah adalah grand design mengkombinasikan pendekatan sektoral dan regional. Pendekatan sektoral didasarkan pada identifikasi sektor-sektor unggulan dan proses pengembangan dari masing-masing wilayah. Karena keterbatasan anggaran, maka harus fokus pada satu wilayah, ada pusat unggulan yang mendukung regional KTI dan ada juga pusat unggulan yang mendukung provinsi.
- Ada program utama yang nyata dan menjadi mesin pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. Diharapkan investasi sebagian besar oleh swasta dan 20% oleh pemerintah, dengan catatan investasi pemerintah harus fokus pada yang akan memberikan *multiplier effect* pada sektor swasta. Untuk itu ada aspek anggaran dan aspek regulasi untuk memudahkan melakukan monitoring. Ini menjadi dasar penetapan koridor ekonomi.
- 20 program utama untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi:
 1. Metropolitan Jabodetabek
 2. Jembatan Selat Sunda
 3. Pengembangan Kelapa Sawit
 4. Pengembangan Karet
 5. Pengembangan Batubara
 6. Pengembangan Nikel
 7. Pengembangan Tembaga
 8. Pengembangan Minyak dan Gas
 9. Pengembangan Pariwisata
 10. Pengembangan Perikanan
 11. Pengembangan Food Estate
 12. Pengembangan Industri Makanan - Minuman
 13. Pengembangan Industri Tekstil
 14. Pengembangan Industri Mesin dan Peralatan Transportasi
 15. Pengembangan Industri Perkapalan
 16. Pengembangan Industri Baja

17. Pengembangan Industri Aluminium
 18. Pengembangan Industri Telematika
 19. Penguatan Konektivitas Nasional
 20. Membangun Kapasitas IPTEK
- Pengembangan aktivitas ekonomi ke-20 program utama tersebut difokuskan pada 6 (enam) koridor ekonomi yang telah ditetapkan, yaitu:
1. Koridor Ekonomi Wilayah Sumatera
 2. Koridor Ekonomi Wilayah Jawa
 3. Koridor Ekonomi Wilayah Kalimantan
 4. Koridor Ekonomi Wilayah Sulawesi
 5. Koridor Ekonomi Wilayah Bali-Nusa Tenggara
 6. Koridor Ekonomi Wilayah Papua

PROGRAM UTAMA	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali - NT	Papua
Jabodetabek						
Jembatan Selat Sunda						
Kelapa Sawit						
Karet						
Batubara						
Nikel						
Tembaga						
Minyak dan Gas						
Pariwisata						
Perikanan						
Food Estate						
Ind. Makanan – Minuman						
Industri Tekstil						
Industri Mesin – Peralatan Transportasi						
Industri Perkapalan						
Industri Baja						
Industri Aluminium						
Industri Telematika						
Konektivitas Nasional						
Kapasitas IPTEK						

- Strategi Transformasi Ekonomi Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Inklusif dan Berkelanjutan. Strategi Utama:
- Mengembangkan Koridor Ekonomi Indonesia: membangun pusat-pusat pertumbuhan di setiap pulau, dengan pengembangan klaster industri berbasis sumber daya unggulan (komoditi dan/atau sektor)
 - Memperkuat Konektivitas Nasional: mengurangi *transaction cost*, mewujudkan sinergi antar pusat pertumbuhan dan mewujudkan akses pelayanan yang merata, meliputi :
 - konektivitas intra dan inter pusat pertumbuhan
 - konektivitas international (*gate* perdagangan dan wisatawan),
 - konektivitas lokal untuk pembangunan inklusif
 - Mempercepat Kemampuan Iptek Nasional

- Strategi Pendukung:
 - Mengembangkan kebijakan Investasi
 - Mengembangkan kebijakan perdagangan, termasuk kerjasama perdagangan
 - Mengembangkan kebijakan pembiayaan
 - Kebijakan pengembangan Public Private Partnership (PPP)
- Strategi Pengembangan Koridor Ekonomi, 4 tahap:
 - Menentukan pusat ekonomi
 - Menentukan kebutuhan konektivitas antara pusat ekonomi
 - Validasi dengan rencana pembangunan nasional
 - Menentukan konektivitas lokasi sektor fokus ke sarana pendukung
- Rangkuman Tema Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia:
 - Sumatera: Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional
 - Jawa: Pendorong Industri dan Jasa Nasional
 - Kalimantan: Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional
 - Sulawesi: Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Nasional
 - Bali Nusa Tenggara: Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional
 - Papua: Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera
- Integrasi ekonomi adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat langsung dari konsentrasi produksi dan manfaat jangka panjang konvergensi standar hidup. Ke depan, apabila suatu daerah telah mencanangkan satu program diharapkan semua diolah ditempat tersebut dan dapat keluar dari pelabuhan tersebut ditambah dengan dukungan regulasi dan anggaran.
 - Kelapa Sawit di koridor Kalimantan
 - Karet lebih banyak di koridor Sumatera
 - Batubara lebih banyak di koridor Sumatera
 - Nikel di Sulsel dan Sultra
 - Tembaga di Papua dan Maluku
 - Migas lebih banyak di Halmahera, Kepala Burung
 - Pariwisata fokus di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
 - Perikanan dipusatkan di Sulawesi dan Maluku Utara
 - Food Estate dipusatkan di Papua
 - Industri Makanan lebih banyak di Jawa dan sebagian di Sulawesi
 - Tekstil berfokus di Jawa
 - Peralatan makanan berfokus di Jawa
 - Baja berfokus di Kalimantan
 - Aluminium berfokus di Kalimantan
 - IPTEK, akan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di masing-masing wilayah.

III. Respon dan Masukan

1) Masukan untuk Koridor Ekonomi Indonesia

- Tema dari Koridor Ekonomi Sulawesi hendaknya memasukkan pertambangan karena Sulawesi Tenggara adalah Pusat Industri Pertambangan Nasional termasuk aspal yang ada di Buton.

- Koridor Papua-Maluku
 - Mengapa Koridor Papua-Maluku, tidak dimasukkan bidang perikanan dan kelautan, padahal Maluku telah dicanangkan sebagai Lumbung Ikan Nasional.
 - Maluku tetap fokus untuk mendorong bidang kelautan dengan tiga wilayah penangkapan: Laut Aru, Laut Banda dan Laut Seram.
 - Selain itu, ada 7 provinsi yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan sebagai pengembangan Budidaya Rumput Laut, diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama Kementrian PDT
 - Menteri Ristek menetapkan Maluku sebagai Pusat Pengembangan Hubungan Wilayah Kemaritiman.
 - Sebaiknya Maluku Utara dilepaskan dari Koridor Ekonomi Sulawesi dan bergabung dengan Maluku dan Papua.
 - Meminta Bappenas untuk memperhatikan dan merevisi dokumen Koridor Ekonomi dimana tidak disebutkan secara spesifik mengenai provinsi Maluku.
- Masalah di KTI, potensi yang besar tapi tidak diikuti dengan minat investor, untuk itu perlu insentif-insentif dari pemerintah pusat dan daerah melalui intervensi APBN di KTI
- Perlu mendorong industri hilir di bidang pertanian, perkebunan, dan bagaimana mendorong pembangunan pabrik-pabrik di daerah khususnya yang memiliki potensi produksi dan insentif tax holiday untuk swasta.
- Untuk Sulbar perlu menggalakkan potensi minyak dan gas (ada 9 teluk minyak yang sudah dikontrakkan). Dalam master plan perlu dimasukkan infrastruktur yang menunjang untuk industrialisasi migas.
- Pembagian tugas provinsi dan daerah perlu mendapatkan perhatian khusus, ada regulasi yang saling bertentangan (contoh: perijinan). Penataan kewenangan antara provinsi dan kab/kota dimana dalam PP No. 38 banyak kewenangan yang diberikan kepada kab/kota sehingga gubernur sangat terbatas dalam melakukan koordinasi dan pengawasan, padahal banyak izin khususnya pertambangan dan perkebunan yang dikeluarkan oleh kab/kota tumpang tindih dan tidak dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi.
- Tanggapan Bappenas:
 Saat ini sampai Maret 2011 sudah ada Kelompok Kerja per koridor dan pembahasan pada Forum Kepala Bappeda sebagai bahan diskusi untuk memberikan masukan pada Pokja per koridor. Masukan dari Bappeda Provinsi sangat diharapkan untuk kemudian dimasukkan pada pertemuan Kelompok Kerja Koridor Ekonomi Indonesia. Koridor Ekonomi Indonesia akan diluncurkan oleh Presiden akhir Maret/awal April.

2) Isu-Isu Strategis Percepatan Pembangunan KTI Sebagai Masukan Bagi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012

No.	Provinsi	Isu-Isu Strategis
1.	Sulawesi Tengah	<p>A. BIDANG SOSIAL BUDAYA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan kemiskinan 2. Kurangnya dokter ahli di Sulawesi Tengah untuk mendukung Rumah Sakit Tipe B dan Fakultas Kedokteran Untad Palu 3. Penyediaan sarana dan prasarana RSUD Undata Palu sebagai Rumah Sakit Pendidikan untuk mendukung Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako 4. Keterbatasan dana dalam pembiayaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. 5. Pembangunan Rumah Sakit Mata di Palu, Sulawesi Tengah 6. Pembangunan Sekolah Kejuruan Perikanan dan Kelautan terpadu di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah, 7. Penyediaan sarana dan pasarana Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako 8. Pengembalian urusan pengelolaan Panti Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Panti Jompo ke pusat karena keterbatasan pembiayaan daerah. <p>B. BIDANG KERJASAMA DAN INFRASTRUKTUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan infrastruktur jalan Trans Sulawesi 2. Peningkatan pelabuhan laut Pantoloan 3. Perpanjangan landasan pacu dan landasan parkir Bandara Mutiara Palu 4. Peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan 5. Pengelolaan pulau kecil terluar di pulau Sulawesi sebagai beranda depan negara (Pulau Lingayan, Pulau Silando, dan Pulau Dolongon masing-masing di Kabupaten Toli-toli dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah). 6. Kondisi fisik Pulau Sulawesi yang sangat rentan terhadap bencana alam geologi (rehabilitasi kondisi fisik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat pasca banjir dan longsor di desa Podi di Kabupaten Tojo Una Una, dan banjir di Morowali Tahun 2007). 7. Perwujudan kawasan lindung untuk memelihara kelestarian keanekaragaman hayati endemik dan mengurangi dampak pemanasan global di Pulau Sulawesi (sebaran lahan kritis dan DAS kritis di Provinsi Sulawesi Tengah dan kerusakan ekosistem Teluk Tomini di Kabupaten Parigi Moutong, Poso, Tojo Una Una dan Banggai, serta Kawasan endemik "Scihtosomiasis" di Kabupaten). 8. Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Pulau Sulawesi (kesenjangan pembangunan antar desa dan kota, serta kesenjangan ekonomi akibat rendahnya akses pelayanan infrastruktur di daerah terpencil seperti di Kabupaten Tojo Una Una).

No.	Provinsi	Isu-Isu Strategis
		<p>9. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi potensial untuk memenuhi energi nasional Khususnya di pulau Sulawesi (potensi minyak dan gas di blok Surumana, Kecamatan Banawa Selatan di Kabupaten Donggala; Gas Alam Dongi Senero Kabupaten Banggai; dan pembangunan PLTA Poso Sulewana Kabupaten Poso).</p> <p>C. BIDANG EKONOMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan yang berdaya saing tinggi 2. Tingginya tingkat kerusakan hutan karena eksploitasi hutan yang tidak terkendali 3. Pengembangan kompetensi industri inti daerah 4. Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional 5. Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus 6. Pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam di pulau Sulawesi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat (potensi prospektif sektor unggulan di Provinsi Sulawesi Tengah fokus pada sektor pertanian, kelautan dan pariwisata, misalnya: pengembangan pariwisata kepulauan Banggai dan Kepulauan Togian).
2.	Sulawesi Tenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, e-Government - Sinkronisasi Regulasi Pusat Daerah - Pelayanan Perizinan Satu Pintu, e-Procurement - Revitalisasi PP No. 19 Tahun 2010 - Deregulasi Fiskal dan Non Fiskal untuk Kawasan Ekonomi Khusus 2. Pembangunan Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Industri Pertambangan) - Revitalisasi Peran KAPET - Sinkronisasi Pusat-Pusat Pertumbuhan melalui Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui peningkatan akses terhadap kegiatan investasi dan permodalan - Pengembangan komoditas unggulan daerah melalui revitalisasi pusat-pusat pertumbuhan - Penciptaan iklim investasi yang kondusif - Pengembangan kapasitas manajemen pengelolaan usaha mikro dan menengah serta usaha kreatif - Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam - Pembangunan dan peningkatan sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka menunjang swasembada dan ketahanan pangan

No.	Provinsi	Isu-Isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di daerah - Revitalisasi pasar-pasar tradisional - Peningkatan kualitas peralatan dan data potensi energi dan sumberdaya mineral - Peningkatan pemanfaatan energi alternatif untuk pengembangan ketenagalistrikan <p>3. Percepatan pembangunan infrastruktur kewilayahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan poros Trans Sulawesi dan jalan nasional serta provinsi dalam rangka mendukung KEK, KAPET, KEI - Pemanfaatan sumber daya air untuk PLTA, irigasi, dan kebutuhan air baku lainnya - Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perhubungan darat, laut, dan udara - Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana telekomunikasi (ICT) - Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana permukiman dan perumahan - Peningkatan kualitas penataan ruang - Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup - Penempatan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) - Pengembangan laboratorium kelautan untuk menjadikan Wakatobi sebagai Center of Excellence - Pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu dengan fokus pada peningkatan teknologi kelautan - Pengembangan sistem pemantauan, pengawasan, dan pengamanan laut Wakatobi (MCS) melalui pembangunan radar pantai terpadu - Pembangunan infrastruktur secara terpadu tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota <p>4. Peningkatan Kualitas SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses dan mutu pendidikan 12 tahun, pendidikan kejuruan dan pendidikan luar sekolah - Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan - Pengembangan sekolah model rintisan SBI dan SI - Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan individu - Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat - Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan - Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan - Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan - Pembinaan olah raga berprestasi dan olahraga massal - Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana olahraga - Peningkatan kualitas tenaga kerja - Pembinaan penyandang cacat dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui

No.	Provinsi	Isu-Isu Strategis
		<p>strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan riset dan teknologi dalam pembangunan daerah - Pengembangan SDM terdidik melalui pembangunan Internasional School for Marine And Protected Area Management (SMPAM) <p>5. Pemantapan pembangunan kebudayaan dan pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana obyek dan daya tarik wisata daerah - Promosi daerah tujuan wisata - Peningkatan keterampilan tenaga pengelola pariwisata - Peningkatan industri MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition) - Pemeliharaan Situs-Situs Cagar Budaya Daerah (SCBD) - Pembangunan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat - Peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah
3.	Gorontalo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu Pengurangan Kemiskinan: lebih diarahkan untuk peningkatan alokasi anggaran terkait intervensi melalui kluster 1-3 dan kluster 4 2. Disparitas kesenjangan SDM: <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan akses pendidikan - Peningkatan mutu pendidikan 3. Kualitas dan kuantitas infrastruktur: <ul style="list-style-type: none"> - By pass Gorontalo - Kanal Tamalate - Irigasi - Jalan dan jembatan - Embarkasi Haji 4. Investasi: <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pohuwato dan Gorontalo Utara - Koridor Ekonomi Indonesia 5. Pengembangan Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> - Pulau Saronde - Pinogu (Ecotourism) - Taman Laut Olele 6. UMKM 7. Peningkatan produksi/produktivitas pertanian <ul style="list-style-type: none"> - Jagung - Padi - Kakao - World Maize Conference 2012 8. Pengembangan perikanan/kelautan <ul style="list-style-type: none"> - Minapolitan - Kapal ikan - Taksi Mina Bahari - Rumput laut

No.	Provinsi	Isu-Isu Strategis
		9. Energi <ul style="list-style-type: none"> - Listrik PLN - Geotermal - Bio Etanol 10. Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi Danau Limboto 11. Pembangunan Wilayah <ul style="list-style-type: none"> - KTM - KEK - KEI 12. Banjir <ul style="list-style-type: none"> - Kanal Tamalate - Saluran air/drainage Kota Gorontalo
4.	Sulawesi Barat	1. Transmisi Jaringan 500 KV antara Mamuju-Palu dan Karama-Mamuju 2. PLTA KARAMA Tahap 1 dengan kapasitas 310 MW 3. Penyediaan Air Baku dari sungai Karama 4. Fasilitas Infrastruktur mendukung 9 Blok Migas (Jalan, Air Baku, Listrik dll) 5. Pembangunan Bandara Tamba Padang Tahap Ultimate dgn Landasan 2.500m; Apron 20.000m ² ; ILS dll 6. Pembangunan Pelabuhan Container Belang-Belang 7. Jaringan Kereta Api Bonehau-Pelabuhan Belang-Belang untuk Angkutan Batubara 8. Perlu Relokasi Jln Nasional 10 Km di Bandara Tamba Padang dan Pelabuhan Perikanan Palipi 9. Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Container Belang-Belang 10. Pembangunan dan Standarisasi Jalan Nasional panjang 576 Km 11. Pembangunan Jalan Strategis Nasional panjang 250 Km 12. Pembangunan Jalan Mamuju Multi Mode Access Road panjang 101 Km 13. Jaringan Irigasi, Bendung dan Bendungan untuk Irigasi Teknis Tomo Tahap 2 dengan area sawah 20.000 Ha 14. Rusunami dan Rusunawa sebanyak 10 Twin Blok tersebar di 5 Kabupaten 15. Jembatan Bentang panjang 1.500 m menghubungkan lokasi Wisata Pulau Karangpuang 16. RTRW Pulau Sulawesi 17. RTRW Provinsi Sulawesi Barat 18. Pabrik Kakao 19. Rumah Sakit Vertikal Sulawesi Barat 20. Universitas "Negeri" Sulawesi Barat 21. Gerakan Nasional Pembaharu Kakao
5.	Sulawesi Selatan	A. Bidang Infrastruktur <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Bandara Toraja dan Bandara Selayar 2. Pembangunan Pelabuhan A. Mattalatta di Kabupaten Barru

No.	Provinsi	Isu-Isu Strategis
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembangunan Bendung Gerak Danau Tempe 4. Pembangunan Bendung Passolerang 5. Pembangunan Bendungan Kelara' KarangloE 6. Penyediaan air bersih pada seluruh desa dan pulau – pulau 7. Pembangunan Embung 8. Pembangunan Jalan Poros Maros – Parepare 9. Pembangunan Jalan baru 10. Pembangunan Jalan Akses di COI 11. Penyelesaian Plaza COI 12. Pembangunan Pembangkit Listrik <p>B. Bidang Ekonomi (Untuk Mendukung Ketahanan Pangan)</p> <p>Sektor Pertanian</p> <p>Sub. Sektor Tanaman Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan SILO dan Driyer pada seluruh Kabupaten/Kota 2. Bantuan benih padi Hibrida dan Non Hibrida 3. Bantuan benih jagung hibrida 4. Pengembangan mekanisasi pertanian, berupa bantuan alat mesin pertanian <p>Sub. Sektor Perkebunan (untuk menunjang gernas kakao)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benih Kakao Somatic Embryo Genesis sebesar 9.867.000 bibit 2. Intensifikasi kakao 4.610 ha, Rehabilitasi kakao 31.856 ha, Peremajaan kakao 9.867 ha 3. Pengembangan Industri Kakao 4. Jalan produksi untuk kakao sebesar 100 km <p>Sub. Sektor Peternakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggemukan sapi (impor) di Kab Maros, Gowa, Takalar, Sidrap, dan Bantaeng 2. Pengembangan Sapi berupa Pengadaan sapi untuk mendukung sejuta Ekor (Bulukumba, Sinjai, Bone, Barru, Gowa, Pinrang, Sidrap, Wajo, Pangkep, Luwu Utara, Luwu Timur dan Selayar) 3. Pengembangan Infrastruktur , Pos Keswan dan Peralatannya di setiap Dua Kecamatan 4. Pengembangan Industri Pengalengan Daging 5. Investasi Pengembangan budidaya ternak (Ranch) di Pinrang, Sidrap, Enrekang, Wajo, dan Luwu 6. Pengembangan Industri Pakan dan Inseminasi Buatan <p>Sektor Perikanan dan Kelautan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Komoditas Rumput Laut, Udang, Bandeng dan Ikan Karang 2. Pengembangan daerah Minapolitan 3. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia di Kota Makassar

No.	Provinsi	Isu-Isu Strategis
		<p>4. Kerjasama teluk Bone</p> <p>Sektor Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan penataan kawasan wisata di Toraja 2. Penataan kawasan wisata Fort Rotterdam dan Benteng Somba Opu 3. Pengembangan kawasan wisata pecinan, dan revitalisasi gedung kesenian (societ de harmonie) 4. Pengembangan Wisata Danau Lakkang/Sungai Tallo, dan Obyek wisata Pulau Samalona 5. Penataan rest area pulau takabonerate, rehabilitasi bangunan nekara perunggu pulau selayar dan penataan kawasan wisata pantai bira 6. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata kebun raya pucak <p>Sektor Perindustrian dan Perdagangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri pengolahan rumput laut, industri kakao, industri kemasan, dan industri sutera 2. Pembangunan Gedung Convention Center 3. Optimalisasi pusat distribusi regional (PDR) 4. Pembangunan pasar tradisional modern <p>C. Bidang SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan BLK Internasional; 2. Pembangunan Sekolah Penerbangan; 3. Pembangunan Rumah Sakit Sayang Rakyat; 4. Pembangunan Kampus IPDN
6.	Sulawesi Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi dan Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Energi Terbarukan - Pengembangan Pariwisata (<i>Marine Tourism Industry & Community Based Eco-Tourism</i>) - Pengembangan Industri Perikanan - Peningkatan Ketahanan Pangan - Peningkatan Investasi, Pengembangan Ekonomi Lokal, dan Industri Kreatif 2. Kualitas SDM dan Tingkat Kemiskinan Wilayah: <ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian MDGs dan Penurunan Angka Kemiskinan serta Pengangguran - Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan 3. Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pembangunan tanpa korupsi 4. Kualitas Jaringan Infrastruktur Wilayah dalam mendukung <i>Intra Regional Connectivity</i>: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Budaya - Pengembangan Koridor Ekonomi; Kawasan Strategis Nasional (KAPET, KEK). Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Agropolitan,

No.	Provinsi	Isu-Isu Strategis
		<p>Minapolitan, Kawasan Sentra Produksi). Kawasan Andalan (Bunaken). Kawasan Perbatasan, Pulau-pulau Terdepan, dan Terpencil.</p> <p>5. Degradasi Lingkungan Hidup termasuk Keragaman Hayati dan Mitigasi Bencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konservasi Lingkungan Hidup - Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>) dan Bencana Alam
7.	Maluku	<p>1. Peningkatan Pemanfaatan Potensi unggulan Daerah Kepulauan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional - Pengembangan budidaya rumput laut (tujuh Provinsi). - Pembangunan Maluku sebagai provinsi rempah-rempah - Pembangunan Maluku sebagai salah satu provinsi pariwisata bahari - Percepatan eksplorasi dan eksploitasi potensi energy dan sumberdaya mineral. <p>2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Kawasan Timur Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran antara pusat dan daerah - Percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan/PKH (Provinsi Maluku belum mendapat alokasi anggaran untuk PKH) <p>3. Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di Kawasan Timur Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesenjangan antar jenjang pendidikan dan wilayah - Masih tingginya kasus malaria, diare, HIV/AIDS, gizi buruk - Masih tingginya angka kematian ibu dan balita <p>4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Kepulauan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana pelabuhan penyeberangan baru terbangun sebanyak 16 dari yang direncanakan sebanyak 40. - Jumlah kapal penyeberangan yang tersedia baru mencapai 15 dari yang direncanakan sebanyak 24 unit. - Dermaga pelabuhan singgah telah terbangun 25 unit dari yang direncanakan sebanyak 51 unit. - Landasan Bandar Udara (Tual, Saumlaki, Dobo) dan Lapangan terbang Perintis (Banda, Wahai, Amahai, Kisar, Namrole, Namlea, Larat) Masih terbatas - Belum tersedia lapangan terbang di beberapa daerah seperti TEPA, MOA, dan ILWAKI. - Jumlah desa yang belum terlistriki sebanyak 413 desa - Irigasi fungsional telah terbangun seluas 19.120 Hektar dari yang direncanakan sebesar 34.910 Hektar hingga tahun 2014. - Penyediaan air bersih telah mencapai 39,5%. - Panjang sistim jaringan jalan nasional di Maluku telah mencapai

No.	Provinsi	Isu-Isu Strategis
		<p>985,46 km pada Tahun 2009, dimana 63,51% jalan nasional dalam kondisi mantap dan 36,49% kondisinya tidak mantap, sedangkan untuk jalan provinsi kondisi mantap 45,02% dan tidak mantap 54,98%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan layanan informasi telekomunikasi melalui telepon baru mencapai 65 desa pada tahun 2010 dari yang direncanakan sebanyak 710 desa. - Jumlah pasar yang telah terbangun sebanyak 29 unit dari yang direncanakan sebanyak 42 unit hingga tahun 2014. <p>5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan Negara</p> <p>Kondisi Daerah Kawasan Perbatasan Negara saat ini di Maluku adalah dicirikan oleh tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, rendahnya tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta terbatasnya sarana dan prasarana wilayah. Sebagian besar wilayah di daerah belum memiliki jaringan listrik dan komunikasi, dan infrastruktur dasar lainnya.</p> <p>Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka percepatan pembangunan pada berbagai bidang di kawasan perbatasan Negara, termasuk di Maluku.</p> <p>6. Pengembangan Riset Unggulan Maritim</p> <p>Riset unggulan maritim difokuskan pada budidaya perikanan terutama rumput laut, ikan kerapu, kerang mutiara dan lobster</p>
8.	Maluku Utara	<p>1. Pengembangan infrastruktur dan prasarana pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Percepatan ring road Pulau Halmahera dan Pulau Morotai - Peningkatan Bandara Babullah Ternate dan percepatan Bandara Internasional di Pulau Morotai - Sarana prasarana Sail Indonesia di Morotai 2012 dan megaminapolitan - Sarana prasarana transportasi darat, laut, udara - Sarana prasarana telekomunikasi, energi, pangan, dan sumber daya air - Peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya. <p>2. Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan dan perluasan program-program pro rakyat</p> <p>3. Peningkatan ketahanan pangan, mutu pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya</p> <p>4. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi melalui peningkatan sentra-sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, kehutanan, pariwisata dan sektor strategis lainnya termasuk peningkatan UKM dan koperasi</p> <p>5. Pengefektifan implementasi pelaksanaan otonomi daerah, pelayanan umum serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang</p> <p>6. Pengembangan penelitian, teknologi tepat guna, informasi, komunikasi, energi, sumber daya air dan kerja sama regional</p>

No.	Provinsi	Isu-Isu Strategis
		7. Peningkatan partisipasi masyarakat, stabilitas sosial, agama, politik, hukum, keamanan dan pemberdayaan perempuan
9.	NTT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ternak 2. Pengembangan garam 3. Pengembangan infrastruktur pariwisata: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan Negara, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten - Pelabuhan Laut 4. Pengembangan perikanan dan kelautan 5. Pengembangan gas bumi di Pulau Flores 6. Pengembangan pariwisata di Flores 7. Pengembangan jagung, tanaman perkebunan kopi, kakao, cengkeh dan jambu mete 8. Dukungan dana untuk Sail Komodo 2013
10.	NTB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pariwisata: <ul style="list-style-type: none"> - Penataan infrastruktur destinasi wisata yang sudah berkembang - Peningkatan kapasitas jalan strategis nasional menuju daerah tempat wisata - Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat sadar wisata - Promosi wisata di manca negara 2. Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Sapi, Jagung dan Rumput Laut (PIJAR): <ul style="list-style-type: none"> - Program Bumi Sejuta Sapi, Agro Bisnis jagung dan agribisnis Rumput Laut. - Membangun komoditi unggulan bibit sapi, jagung dan rumput laut. - Pembangunan Industri pengolahan berbasis komoditas Sapi, Jagung dan Rumput Laut. 3. Pembangunan Kawasan Wisata Mandalika Resort Lombok Tengah) dan menjadikan/mengusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata: <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian pembangunan dan pengoperasian bandara Internasional Lombok - Pembangunan Infrastruktur dasar di kawasan Mandalika Resort (Jalan, Telekomunikasi, listrik, air dll) 4. Pengurangan Disparitas Pembangunan Antara Wilayah: <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan/peningkatan kemandirian infrastruktur jalan dan jembatan - Membuat Perda Percepatan Pembangunan Jalan dengan sistem tahun jamak - Pembangunan sumberdaya air (bendungan) di P. Sumbawa (Raba bakar kompleks) dan di P. Lombok (Pandanduri Swangi danMujur II) - Pengembangan Bandara Salahudin Bima dan Brangbiji Sumbawa - Pengembangan Pembangunan Listrik Jeranjang (Lombok Barat) Geothermal (Hu'u dan Sembalun)

No.	Provinsi	Isu-Isu Strategis
11.	Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pembangunan kampung serta peningkatan kesejahteraan masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat kampung dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) - Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat kampung - Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi pembangunan kampung - Penataan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan kampung - Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat - Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 2. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia dengan memberikan perhatian luas pada upaya Peningkatan aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pendidikan dasar sembilan tahun yang merata - Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi; - Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal khususnya pemberantasan buta huruf - Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidikan - Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan - Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit khususnya penyakit menular terutama HIV/AIDS dan Malaria - Peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan - Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan - Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga. 3. Pengembangan Perekonomian Rakyat dengan komoditas-komoditas berorientasi pasar yang didukung oleh Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan dan Daya Tarik Investasi difokuskan pada: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kawasan strategis dan cepat tumbuh : Mimika, Jayapura dan Merauke - Peningkatan daya tarik investasi - Penguatan daya saing ekspor - Revitalisasi industri pengolahan dan kerajinan - Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan - Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja - Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif - Peningkatan Ketahanan Pangan - Peningkatan stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok - Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Kelautan

No.	Provinsi	Isu-Isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan 4. Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi, difokuskan pada : <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Infrastruktur menghubungkan kawasan pegunungan tengah, serta pusat-pusat permukiman, sentra-sentra produksi dan kawasan-kawasan strategis - Percepatan pembangunan di kawasan strategis Mimika :PLTA Urumuka dan pabrik semen; Jayapura : PLTA Mamberamo, Kawasan Industry Bongrang, Ringroad Jayapura, Pelabuhan Depapre, Bandara Sentani; serta kawasan Merauke : MIFEE - Peningkatan pemenuhan air bersih dan sanitasi lingkungan - Pemenuhan Kebutuhan Energi; - Peningkatan jangkauan layanan telekomunikasi 5. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan, Ketentraman, Supremasi Hukum dan Penegakan HAM: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan Publik - Peningkatan Pengelolaan Keuangan daerah - Peningkatan Fungsi pengawasan pembangunan daerah - Peningkatan Demokrasi, penegakan Hukum dan HAM - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur
12.	Papua Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. OTONOMI KHUSUS : Fokus program dan kegiatan dan kegiatan pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Dalam konteks Otsus, pendidikan difokuskan pada penduduk asli Papua dalam menempuh pendidikan yang spesifik seperti keteknikan, kedokteran, pertambangan, perminyakan, penerbang dan bidang eksakta lainnya. 2. GENDER : isu gender menjadi fokus isu prioritas pada tahun 2012 ditujukan untuk mengangkat peran perempuan dalam pembangunan di Papua Barat 3. KEPENDUDUKAN dan SDM : Fokus program dan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi SDM dan kelembagaan baik pada tingkat aparaturnya maupun pada masyarakat. 4. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR : kondisi geografi Papua Barat tergolong sangat berat dan banyak daerah/wilayah kabupaten yang masih terisolasi dan agak sulit terjangkau. Pembangunan jaringan jalan baru dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan perlu ditingkatkan. Selain itu sarana dan prasarana perhubungan juga perlu diperhatikan untuk menembus isolasi wilayah. 5. AGRIBISNIS : Fokus program dan kegiatan diarahkan pada pembangunan di sektor pertanian, perikanan, peternakan. Dibidang pertanian komoditi tanaman pangan dan perkebunan masih menjadi komoditi penting untuk terus dikembangkan seperti padi, hortikultura dataran tinggi, jagung, cacao, pala, kelapa, kelapa sawit, cengkeh dan lainnya. Disektor perikanan, perlu melakukan revitalisasi industri

No.	Provinsi	Isu-Isu Strategis
		<p>perikanan yang ada hingga aktif kembali, dan pembangunan industri pembuatan es batu guna mendukung usaha penangkapan ikan. Di sektor peternakan, Kawasan Bomberay dan Kebar perlu ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan 30.000 ekor sapi bantuan dari Pemerintah Australia.</p> <p>6. LINGKUNGAN HIDUP : Raja Ampat dan Teluk Triton di Kaimana merupakan kawasan pariwisata dengan keragaman spesies dan keendemisan yang saat ini paling populer didunia. Namun sampai saat ini masih belum terkelola dengan baik. Untuk itu perlu dukungan pemerintah pusat dalam menetapkan kedua kawasan tersebut sebagai KAWASAN TUJUAN WISATA NASIONAL, sehingga dapat dijadikan dasar pengelolaan yang lebih professional dan terpadu. Selain itu dalam konstelasi global, Papua Barat memiliki peluang dan peran dalam penyelamatan iklim, serta berpotensi sebagai sumber ekonomi dalam konteks perdagangan karbon. Perlu dukungan regulasi yang detil dari pusat mengenai penyelenggaraan REDD+ dalam konteks penyelamatan iklim dan perdagangan karbon yang berpihak pada daerah dan masyarakat lokal.</p> <p>7. EKONOMI WILAYAH DAN KERAKYATAN : Difokuskan pada menumbuhkembangkan pembangunan ekonomi pada empat Satuan Wilayah Pengembangan yang sudah terbentuk di Papua Barat. Fokus program dan kegiatan diarahkan pada pengembangan KEK di Sorong, mendorong dan memfasilitasi UMKM, bantuan modal usaha bagi petani dan nelayan, serta mendorong penciptaan iklim investasi yang sehat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi wilayah di Papua Barat.</p>

3) Selain usulan masing-masing provinsi, usulan bersama secara regional adalah:

- Lintas Kereta Api Pulau Sulawesi
- Pengembangan Teluk Tomini & Terusan Khatulistiwa
- Pengembangan kakao dan jagung (Sulawesi Corn and Cacao Island)
- Pengembangan Laut Arafura (Maluku, Papua, Papua Barat)
- Mendorong pembangunan 5 provinsi berbasis kepulauan (Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB)

IV. Jaringan Peneliti KTI (JiKTI)

- Latar Belakang JiKTI
 - Terbentuk Juli 2007 dibawah Forum KTI
 - Beranggotakan peneliti dari KTI
 - Mendorong upaya kolaboratif diantara peneliti KTI untuk mengisi kebutuhan kebijakan dan perencanaan pembangunan bertumpu pada hasil penelitian
 - Meningkatkan kualitas proses dan capaian pembangunan
- Tujuan JiKTI:
 - Membangun dan mengembangkan kemitraan diantara peneliti KTI

- Meningkatkan kapasitas peneliti utk berperan aktif dalam proses pembangunan yang berbasis pengetahuan
 - Mewujudkan pemerintahan yang produktif, efektif, efisien serta berpihak pada rakyat.
 - Struktur JiKTI:
 - Perwakilan (Focal Point) di 12 Provinsi
 - Program Pengembangan Sektor Pengetahuan untuk Kebijakan Oleh AusAID/The Asia Foundation – JiKTI
- Tujuan Program:
- Meningkatkan kapasitas peneliti KTI
 - Dukungan kepada Bappeda provinsi melalui JiKTI
 - Proses perencanaan pembangunan berbasis pengetahuan di KTI
 - Pertukaran pengetahuan menuju efektifitas pembangunan KTI
- Kegiatan Utama:
- Penguatan kapasitas kelembagaan JiKTI
 - Penguatan kapasitas teknis dalam menghasilkan pengetahuan yang berguna bagi pembuatan kebijakan
- Diharapkan Bappeda Provinsi dapat berkolaborasi dengan JiKTI di masing-masing provinsi untuk mendorong perencanaan pembangunan yang bertumpu pada hasil penelitian. Pada saat yang bersamaan, para Kepala Bappeda atau perwakilan Bappeda yang hadir, menyatakan harapannya agar JiKTI bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan institusi-institusi yang terkait (seperti DRD, Balitbangda) dan menjaga kredibilitas penelitiannya.

V. Tindak Lanjut Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI:

1. Isu-isu strategis dari masing –masing provinsi sebagai masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2012 akan dikirimkan ke Sekretariat Forum KTI (BaKTI) dan selanjutnya Ketua Pokja Forum KTI akan mengirimkan ke Ibu Menteri Bappenas.
2. Selain usulan masing-masing provinsi, usulan bersama secara regional adalah:
 - Lintas Kereta Api Pulau Sulawesi
 - Pengembangan Teluk Tomini & Terusan Katulistiwa
 - Pengembangan cacao dan jagung (Sulawesi corn and cacao island)
 - Pengembangan Laut Arafura
 - Mendorong pembangunan 5 provinsi berbasis kepulauan (Sulut, Maluku, Malut, NTT, NTB)
3. Pembahasan Koridor Ekonomi Indonesia untuk Pulau Sulawesi akan difasilitasi oleh BKPRS tanggal 19 Maret 2011.
Untuk Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, akan coba difasilitasi oleh BaKTI dan Forum KTI.
4. JiKTI punya misi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dan sudah ditingkatkan kapasitasnya untuk mampu mendukung perencanaan pembangunan. Untuk itu, diharapkan Bappeda Provinsi untuk membuka diri dan mau bekerja sama dengan JiKTI di masing-masing provinsi.
5. Rencana pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI VII akan diadakan pada bulan Oktober 2011 di Sulawesi Tenggara. Tema akan didiskusikan kemudian.